

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Agus Takariawan, 2016. *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Andi Hamzah, 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Aria Zurnetti, Nani Mulyati, dan Felia Hermayeti, 2021. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat Studi Hukum Adat Minangkabau*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Edi Setiawan dan Kristian, 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Prenada media Group.
- Edita Elda, 2021. *Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*, Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Elwi Danil, 2011. *Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Evi Hartini, 2008. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Febby Mutiara Nelson, 2020. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayatullah, 2021. *Filosofi Justice Collaborator*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media.
- Ishaq, 2020. *Hukum Pidana*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Kandri Husin dan Budi Husin, 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

KPK. 2006, *Memahami Untuk Membasmi : Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. KPK. Jakarta.

Kristian dan Yopi Gunawan, 2015. *Tindak Pidana Korupsi : Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC)*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Lilik Mulyadi, 2015. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Organized Crime*. Bandung : Penerbit PT. Alumni.

M. Yahya Harahap, 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media Group.

Rifa'i Abubakar, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Robberts. K dan Aris Irawan, 2018. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta : Penerbit Thafa Media.

Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Tofik Yanuar Chandra, 2022. *KPK dan Kewenangan Penetapan Status Justice Collaborator*. Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha.

Zainudin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4960.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 293 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Lembaran Negara Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), KPK, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda (*Wetboek van Strafvordering*).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman (*Strafprozessordnung/StPO*).

Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi dalam Bahaya di Jerman (*Zeugenschutzharmonisierungsgezetz (ZshG)*).

Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi (*Witness Security Reform Act of 1984*) di Amerika Serikat.

Undang-Undang Perlindungan Saksi (*Witness Protection Act 112 of 1998*) di Afrika Selatan.

C. Jurnal

Adi Syahputra Sirait, 2019. Kedudukan dan Efektifitas *Justice Collaborator* di dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5 No. 2.

Anthika Salsabilla Harahap dan Mahrus Ali, 2021. Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata*.

Aria Zurnetti dan Nani Mulyati, 2022. *Law Enforcement Model of Village Fund Corruption Through Adat Criminal Law Approach and Local Wisdom in West Sumatera*. *Nagari Law Review*. Vol. 5 No. 2.

Baharudin Machmud, dkk, 2021. Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 4 No. 1.

Bambang Julianto, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Lex Renaissance*. Vol. 5 No. 1.

Beverly Evangelista dan Baiq Ishariaty Wika Utary, 2019. Kebijakan Hukum Pidana terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Solid*. Vol. 9 No. 2.

Dwi Oktavia Ariyanti dan Muhammad Ramadhan, 2023. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Jerman. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 5 No.

3.

Edita Elda, 2019. Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, *Lex Lata : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 1 No.

2.

Esti Kanti Pertiwi dan Noor Rahmad, 2020. Tinjauan Norma Hukum *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* pada Tindak Pidana Korupsi, *Perspektif*. Vol. 25 No. 2.

Farhan Fauzie Achmad dan Taun Taun, 2022. Peran *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol. 4 No. 5.

Fabianur Wahyu Tri Buana Pustha dan Alfiansyah Fauzan, 2021. Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi. *JMPIS : Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 2 Issue 2.

Fatmawaty Thalib, Fenty U. Puluhulawa, Jufryanyo Puluhulawa, 2023. Diskursus Implementasi Hukum Pembuktian : Komparasi Indonesia dengan Amerika Serikat. *Journal of Comprehensive Science*. Vol. 2 No. 2.

Gerry Jordan dan Khairani, 2024. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan *Justice Collaborator* di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*. Vol. 8 Issue 1.

Ismail, 2018. Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legelite : Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*. Vol. 2 No. 2.

Lailatus Sururiyah, 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *IURIS STUDIA : Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 4 No. 3.

Manambus Pasaribu, 2020, Memperkuat Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Pemberian Perlindungan dan Bantuan terhadap Saksi dan Korban. *Jurnal Ilmiah Simantek*. Vol. 4 No. 2.

Mario Josaphat Ananda Djawa, Karolus K. Meda, dan Debi F. Fallo, 2024. Problematika Normatif Perlindungan Hukum bagi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dalam Hukum Positif di Indonesia, *Petitum Law Journal*. Vol. 1 No. 2.

Moh. Nafri dan Maisa, 2022. *Comparison of The Law System and The Dutch Legal System in Handling The Crime of Corruption. OLJ : Omnibus Law Journal*. Vol. 2. Issue. 1.

Muhammad Fahrul, Syahrudin Nawi, dan Baharuddin Badaru, 2022. Analisis Undang-Undang No, 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Ditinjau Dari Aspek *Justice Collaborator*. *Journal of Lex Generalis (JLS)*. Vol. 3 No. 4.

Nomero Armandheo Simamora dan Edi Pranoto, 2023. Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang Sebagai *Justice Collaborator* di Indonesia. *Law Review*. Vol. 3 No. 1.

Remincel, 2019. Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana. *Ensiklopedia of Journal*. Vol. 1 No. 2. Edisi 2.

Rini Novita, 2023. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol. 5 No. 3.

Syahrir Kuba, 2022. Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah*. Vol 22 No. 1.

Vananda Putra, Elwi Danil dan Aria Zurnetti, 2023. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Banyak

Orang Pada Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT. Pdg. *Unes Law Review*. Vol. 6 No. 1.

Zhulfiana Pratiwi Hafid, 2019. *Justice Collaborator* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Al-Qadau*,/Vol. 6 No. 1.

D. Skripsi dan Tesis

Fadilla Kurnia Putri, 2024. *Kedudukan Justice Collaborator dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia)*. Tesis : Universitas Andalas.

Irfan Zidni, 2022, *Kepastian Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Nurullita Rizqia Utami, 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Upaya Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Tesis : Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.

Sadidah Atun, 2020. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kedudukan Keterangan Saksi Tanpa Sumpah Menurut Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Skripsi : UIN Raden Fatah Palembang.

E. Website

Badan Pusat Statistik, Indeks perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2023 Sebesar 3,92, Menurun Dibandingkan IPAK 2022, diakses melalui Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2023 sebesar 3,92, menurun dibandingkan IPAK 2022 - Badan Pusat Statistik Indonesia (bps.go.id), pada tanggal 31 Mei 2024.

Hukum Online, *Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia*. Diakses melalui Jenis-jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia (hukumonline.com) pada 4 Mei 2024. 23:34 WIB.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Prosedur Perlindungan Saksi di Amerika Serikat*, www.perlindungansaksi.worldpress.com, 2005, hlm. 10, diakses pada tanggal 11 November 2024, jam 13.58 Wib.

Transparency Internasional, Corruption Perceptions Index 2023, diakses melalui *corruption perceptions index 2023 – Transparency International Indonesia*, pada tanggal 31 Mei 2024.

United Nations Office and Drugs and Crime, Praktek Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir, diakses [https://www.unodc.org/roseap/uploads/archive/documents/Publications/Projects/Indonesia/Praktek terbaik perlindungan saksi dalam proses pidana yang melibatkan kejahatan terorganisir.pdf](https://www.unodc.org/roseap/uploads/archive/documents/Publications/Projects/Indonesia/Praktek%20terbaik%20perlindungan%20saksi%20dalam%20proses%20pidana%20yang%20melibatkan%20kejahatan%20terorganisir.pdf) pada tanggal 15 November 2024.

F. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Definisi Korupsi”. KBBI tersedia pada Pencarian - KBBI VI Daring (kemdikbud.go.id). Diakses pada tanggal 2 Juni 2024.

G. Dokumen

Dodik Prihatin dan Nurul Ghuftron, *Studi Komparasi Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Sistem Peradilan Pidana Jerman, Amerika Serikat dan Inggris*, Laporan Hasil Penelitian : Universitas Jember.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.

